

STUDI ITERASI PEMBOBOTAN KLASTER GEOGRAFIS PADA KASUS PROGRAM BERAS UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Meldi Rendra

Program Studi Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri, Telkom University
merudiysk@yahoo.com

Abstrak—Dalam tulisan ini metode audit sosial (*communal-consensus likert-type scale*) dilakukan dalam sebuah iterasi terkait dengan pembobotan terhadap bias klaster geografis pada evaluasi program beras untuk masyarakat miskin. Pada setiap pemangku kepentingan di klaster geografis mempunyai identitas masing-masing termasuk asal usul suku. Identitas mempunyai kecenderungan untuk bersikap kukuh terhadap dirinya. Dalam sebuah forum yang mengandalkan kesamaan cara pandang masalah sebagai sebuah mekanisme yang dipandu fasilitator, semakin besar pengaruh identitas pada pemangku kepentingan, makin besar pula kemungkinan munculnya sejumlah diskonsensus, baik yang terang-terangan atau tersembunyi. Dalam studi beras untuk masyarakat miskin masalah ini dievaluasi dan dicari sebab-sebabnya. Lalu dicari nilai koreksi agar setiap pembobotan dalam audit sosial mendapat bobot yang akurat dan dicari sebabnya.

Kata kunci: pembobotan, akuntabilitas, sisi permintaan, sisi penawaran, klaster geografis, *likert-type scale*

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini merupakan narasi dari “Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Beras untuk Masyarakat Miskin di Indonesia” merupakan hasil kerjasama Pattiro dengan Usaid dalam bentuk program SIAP 2 Pattiro. Pattiro memperoleh pendanaan USAID dalam penelitian ini (Pattiro Indonesia) adalah sebuah lembaga nirlaba nasional yang mempunyai cabang pada puluhan kota di Indonesia. Penelitian ini diinisiasi dan dikoordinasikan oleh USAID Indonesia dan didukung oleh Bulog dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah melaksanakan program beras miskin di setiap desa. Program tersebut mendapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala pengelolaan program pemerintah beras untuk masyarakat miskin selama ini menjadi alasan untuk melakukan klarifikasi faktor integritas dan akuntabilitas terhadap program tersebut.

Program Beras untuk Masyarakat Miskin mencerminkan program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Program itu menjadi tanda bahwa kemiskinan terutama terkait dengan ketidakmampuan dan tidak adanya kesempatan bagi rakyat miskin untuk mengakses, ikut serta dan mengambil manfaat dari proses-proses ekonomi, sosial dan politik bangsa serta masyarakatnya. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar perbedaan tingkat pendapatan atau konsumsi antar

individu berdasarkan standar kesejahteraan terukur seperti asupan kalori minimum atau garis kemiskinan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Kemiskinan juga terkait dengan ketidakmampuan mencapai faktor-faktor di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses pada layanan publik dan infrastruktur dasar. Kemiskinan juga harus dilihat dari perspektif apakah dan bagaimana rakyat miskin dapat, atau diizinkan, turut serta dalam proses penyusunan dan pengambilan keputusan tentang rencana dan anggaran pembangunan komunitasnya serta dalam pelaksanaan program-program yang berpihak pada rakyat miskin. Indonesia sudah melaksanakan banyak kebijakan dan program untuk mengentaskan kemiskinan [1].

Tantangan pertamanya untuk mencapai sasaran itu adalah memilih kebijakan dan program yang tepat di antara banyak pilihan yang ada. Memilih kebijakan dan program baru, di antara faktor-faktor lain tergantung pada pemahaman yang baik tentang kekuatan dan kelemahan program-program pengentasan kemiskinan sebelumnya atau yang sedang berjalan. Pada gilirannya, memerlukan sistem pengawasan yang kuat dan evaluasi berkualitas tinggi. Sistem pengawasan dan evaluasi yang dapat diandalkan hanya berguna jika keluaran (*output*), hasil/manfaat (*outcome*) dan dampak (*impact*) yang diharapkan itu jelas, dapat tercapai dan terukur, dan indikator-indikator pengentasan kemiskinan ditentukan dari awal. Menentukan hal-hal tersebut adalah pekerjaan yang menantang. Hal ini memerlukan antara lain peningkatan pemahaman dan keterampilan para analis kebijakan dan program tentang pengawasan dan evaluasi yang efektif, ditambah kemampuan dan keinginan untuk memanfaatkan evaluasi guna memperkuat program-program yang ada.

Iterasi pembobotan perlu digunakan agar ketika melakukan evaluasi terhadap kebijakan tidak terjadi bias atas penilaian pemangku kepentingan. Jadi secara nasional nilai yang tercantum pada setiap kota dibutuhkan iterasi agar ada kesamaan skor tertentu terhadap kasus nasional tertentu.

Pada setiap pemangku kepentingan di klaster geografis mempunyai identitas masing-masing termasuk asal usul suku. Identitas mempunyai kecenderungan untuk bersikap kukuh terhadap dirinya. Dalam sebuah forum yang mengandalkan konsensus sebagai sebuah mekanisme yang dipandu fasilitator, semakin besar pengaruh identitas pada

pemangku kepentingan, makin besar pula kemungkinan munculnya sejumlah diskonsensus, baik yang terang-terangan atau tersembunyi.

Proses iterasi adalah proses membantu dalam melihat angka yang sesuai dalam penilaian pemangku kepentingan apakah angka itu sudah sesuai. Oleh karena itu diperoleh keakuratan dalam memberikan evaluasi secara nasional. Selain itu, dalam menggali pertanyaan fasilitator menggunakan teknik AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan menggali pertanyaan pada masalah utama, lalu dicoba diturunkan pada masalah cabang, lalu dicari masalah ranting, terus sampai ditemukan masalah akarnya. Proses AHP hanya sebagai alat bantu untuk sampai pada masalah akarnya. Namun pembobotan tetap diletakkan pada masalah utamanya.

Proses AHP melihat masalah-masalah utama dari indikator berikut ini. Program beras untuk masyarakat miskin mempunyai beberapa indikator kinerja: 1) raskin hanya diberikan kepada RTS-PM (penerima manfaat) hasil musyawarah desa/kelurahan yang terdaftar dalam DPM-1; 2) Jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara nasional; 3) Harga tebus raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD; 4) Waktu pelaksanaan distribusi besar kepada RTS-PM raskin sesuai rencana distribusi; 5) terpenuhinya syarat administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu; 6) Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras Bulog.

Proses AHP juga melihat masalah-masalah utama dari indikator berikut ini. Dari indikator tersebut ditemukan fakta dasar yang terkait pelaksanaannya: 1) Sosialisasi kepada pelaksana distribusi dan masyarakat sangat kurang; 2) Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) melebihi data rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM); 3) Jumlah beras yang diterima RTM serta harga tidak sesuai ketentuan; dan 4) Mekanisme pengaduan masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Proses AHP juga menggali melalui peraturan mengenai proses perpindahan komoditas beras raskin dalam proses rantai nilai terkendala sedikit masalah tidak tuntasnya masalah biaya dari distribusi menuju pemanfaat akhir. Oleh karena itu harga di tingkat pemanfaat akhir tidak sesuai dengan desain program. Dengan kelemahan itu, pada pelaksanaan harga komoditas menjadi modus penyelewengan pelaksana. Pelaksana akan beralih tentang tidak diatur masalah itu, akan menjadi biaya tambahan untuk pemanfaat. Di samping itu, kualitas komoditas juga tidak terjaga, berakibat penerima manfaat tidak menerima komoditas yang sesuai dan memadai. Untuk melakukan keluhan kesah untuk itu, masyarakat tidak mempunyai akses yang bisa diandalkan. Oleh karena itu proses umpan balik dari masyarakat dari pelaksanaan raskin ini tidak berjalan semestinya.

Begitu juga dengan masalah AHP menilai akses pada masyarakat tidak berjalan dengan baik, sedangkan regulasi pelaporan mengatur itu, maka tentunya pelaporan yang dilakukan menjadi tidak bisa dinilai oleh masyarakat. Pelaporan berjalan pada mekanisme pemerintah yang diawasi oleh auditor internal dan besar kemungkinan penuh penyelewengan. Syarat administrasi mungkin dipenuhi, tetapi substansi pelaporan berpeluang tidak kredibel.

Aturan mekanisme komplain tidak mendapatkan ruang dalam peraturan sehingga pada pelaksanaannya sulit dilakukan implementasi yang spesifik sesuai program raskin. Memang ada berupa pengaduan yang dibuka oleh Bulog, dengan mekanisme itu tidak bersifat sederhana karena harus menggunakan media komunikasi tertentu. Sifat sederhana dalam pelaporan tidak difasilitasi dalam pengaduan itu. Masyarakat miskin kesulitan melakukan mengutarakan pendapatnya tentang program ini selama penyaluran tentang akses mereka terhadap itu tidak dibuka. Kelemahan fundamental ini akan menjadi cacat yang serius dalam program raskin ini.

Pada ujung masalahnya perlu dilakukan proses iterasi karena perbedaan dalam latar belakang masyarakatnya. Ini yang menjadi perhatian dalam penelitian ini, apa yang menyebabkan terjadi perbedaan skor terhadap kasus yang sama, sehingga kita menemukan alasan kenapa iterasi ini dibutuhkan.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian (cara perhitungan) digunakan sebagai alat evaluasi raskin dengan mengamati masalah iterasi pembobotan klaster geografis. Metodologi berupa *likert type scale* dengan menggunakan skala 4 dengan CR 0,09 pada penelitian yang dilakukan dalam format konsensus (ini bukan istilah lawan dari sampel dalam statistika, tetapi istilah dalam ilmu sosial), dalam arti responden boleh mempengaruhi antar mereka pada sebuah forum sehingga forum memberikan angka *likert type scale* baru.

Penggunaan survei dengan penggunaan pembobotan misalnya *likert-type scale* seringkali dilakukan secara individual dan tertutup. Teknik itu, *-likert type scale-* membatasi pengetahuan individual terhadap pendapat umum. Maka disusunlah model pembobotan yang dilakukan secara komunal dengan lintas pemangku kepentingan secara terbuka. Artinya responden boleh berdebat terhadap pendapat mereka dan mempengaruhi responden lain. Namun demikian setelah dilakukan penilaian, pembobotan tetap dilakukan dengan menggunakan konsensus pada forum yang dilakukan. Konsensus inilah yang menjadi bobot intersubjektif yang dilakukan sebuah forum. Ini yang disebut dengan audit sosial.

Selain menggunakan teknik responden komunal tersebut, teknik lain yang digunakan adalah *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menggali fakta dasar. Penggalan ini dilakukan dengan menggunakan teknik fasilitasi yang dikelola seorang fasilitator yang mempunyai pengalaman terhadap pengelolaan forum [2].

Dalam studi ini diamati adalah berapa nilai iterasi terhadap bias klaster geografis dalam setiap teknik pembobotan yang dilakukan dalam sistem *multistakeholder open likert-type scale*. Ini yang menjadi perhatian peneliti untuk melihat bias pendapat umum di Indonesia [3]. Selain itu juga dicari masalah-masalah yang mendasar terhadap program itu sendiri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil konsensus beberapa kota maka terlihat pada hasil yang ditampilkan pada grafik. Sebenarnya banyak data yang bisa ditampilkan namun karena keterbatasan ruang penulisan ini cuplikan data yang akan ditampilkan. Pada grafik akan diketahui pola klaster geografis yang terjadi dalam penelitian ini. Secara umum bentuk grafik berupa berbentuk gunung simetris “symmetrical mountainous image”, artinya klaster geografis tengah (geografis Jawa) mempunyai sistem penilaian yang lebih tinggi dari bagian kiri dan kanan grafik (non geografis Jawa) dengan bias sebesar 1, – 2,5.

Analisis lebih menguraikan alasan kenapa itu terjadi dalam konsensus sosial, kenapa terjadi nilai iterasi yang berbeda. Berikut berbagai alasan yang diberikan.

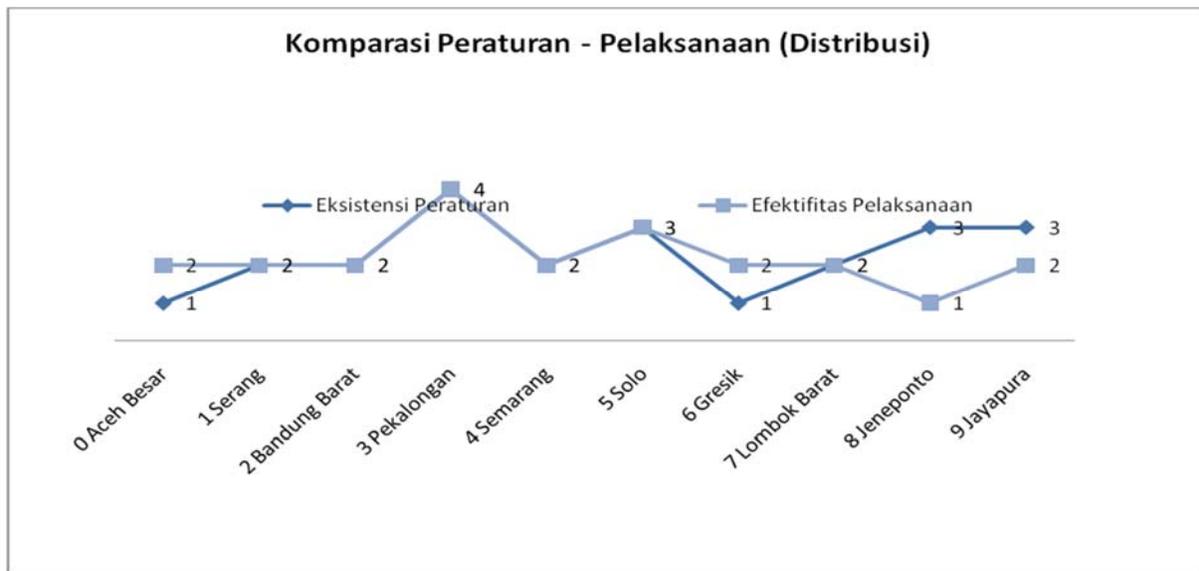
Identitas klaster geografis

Dalam audit sosial (*communal-consensus likert-type scale*) setiap pemangku kepentingan mempunyai identitas masing-masing. Identitas mempunyai kecenderungan untuk bersikap kukuh terhadap dirinya. Dapat dilihat bahwa data iterasi Non-Jawa berbeda dengan Jawa. Dalam sebuah forum yang mengandalkan konsensus sebagai sebuah mekanisme yang dipandu fasilitator, semakin besar pengaruh identitas pada pemangku kepentingan, makin besar pula kemungkinan munculnya sejumlah diskonsensus, baik yang terang-terangan atau tersembunyi. Tampaknya, diskonsensus yang dimotivasi oleh identitas yang sempit itu juga kian sulit disatukan [4]. Butuh waktu untuk melebur identitas klaster geografis untuk menjadi sebuah konsensus yang bermanfaat.

Identitas telah menjadi penghalang tercapainya konsensus rasional seperti yang digambarkan oleh teori konsensus liberal-pluralis-demokratis [5]. Dalam masyarakat yang kurang liberal-pluralis-demokratis, ini akan menjadi sebuah kondisi yang mirip-mirip hegemoni – yakni kelompok tertentu memaksakan “identitas” tertentu kepada kelompok lain yang berbeda [7]. Menghidupkan kembali teori hegemonik dengan menganalisis kondisi yang hegemonik dapat meyakini tentang masalah kelompok kecil, dan dengan demikian memfasilitasi konsensus dalam audit sosial yang dimulai dengan premis bahwa kekuasaan hegemonik yang mempunyai atribut eksploitasi [8]. Salah satu problem besar yang mengganggu fasilitator dalam audit sosial adalah bagaimana konsensus bisa dicapai dalam sebuah acara audit sosial. Atau lebih mendasar lagi, apakah konsensus bisa dicapai?

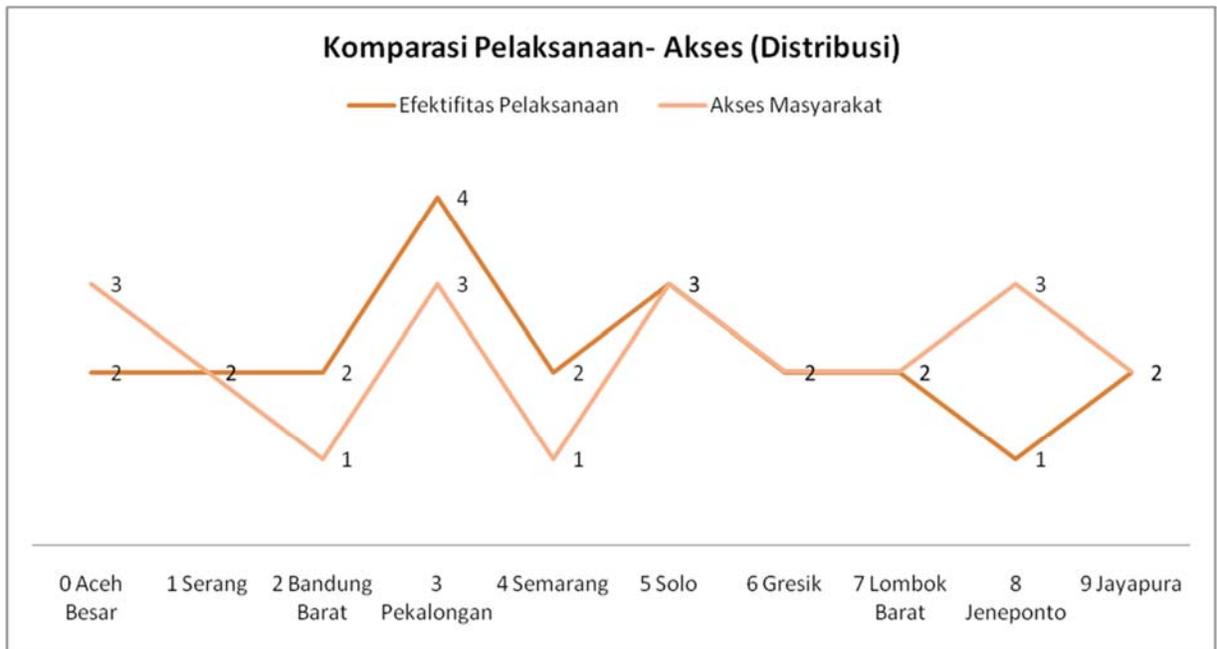
Berhadapan dengan pertanyaan besar ini, fasilitator harus bisa bagaimana merumuskan cara yang efektif untuk mencapai konsensus itu. Teori liberal-pluralis-demokratis adalah satu usaha untuk menjawab bagaimana konsensus semacam itu mungkin dan bisa dicapai.

Namun fasilitator akan sulit menjadi penengah apabila identitas pemangku kepentingan begitu kuat. Teori konflik mengatakan bahwa konsensus jarang bisa dicapai, untuk tidak mengatakan sulit sama sekali. Karakter dasar pada klaster geografis adalah konflik atau pertentangan kepentingan yang “tiada kunjung padam” antara pelbagai kelompok geografis yang berbeda. yang berbeda-beda. Bagi mereka, janji tentang kemungkinan tercapainya konsensus dalam masyarakat yang plural melalui proses musyawarah antara sejumlah subyek yang rasional, seperti diasumsikan pertama itu, sulit digapai.



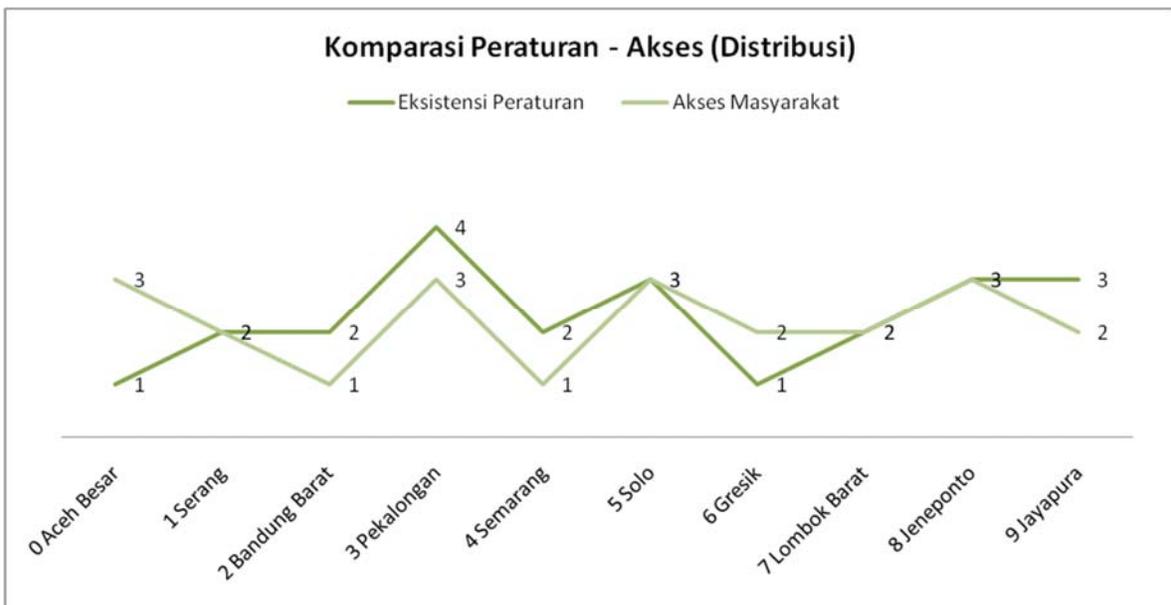
Nilai iterasi #0 = 1 ; #1 = 2 ; #2 = 1 ; #3 = 2 ; #4 = 1 ; #5 = 1,5 ; #6 = 1 ; #7 = 1 ; #8 = 1,5 ; #9 = 1,5

Gambar 1. Penyebaran perbandingan peraturan dan pelaksanaan untuk 9 kota



Nilai iterasi #0 = 2 ; #1 = 2 ; #2 = 1 ; #3 = 2 ; #4 = 1 ; #5 = 1,5 ; #6 = 1 ; #7 = 1 ; #8 = 1,5 ; #9 = 1,5

Gambar 2. Penyebaran perbandingan pelaksanaan dan akses untuk 9 kota



Nilai iterasi #0 = 1,5 ; #1 = 1,5 ; #2 = 1 ; #3 = 2 ; #4 = 1 ; #5 = 1,5 ; #6 = 1 ; #7 = 1 ; #8 = 1,5 ; #9 = 1,5

Gambar 3. Penyebaran perbandingan peraturan dan akses untuk 9 kota

Pola musyawarah yang banyak dianut oleh banyak pola masyarakat saat ini ini banyak dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang dianut oleh mazhab konsensus [9], sehingga terjadi perbedaan nilai iterasi di tiap kluster geografis.

Dalam sebuah audit sosial yang mempunyai rupa-rupa pemangku kepentingan, kita selalu berjumpa dengan beragam

kluster geografis yang berbeda-beda. Kepentingan ini harus ditampung. Fakta itu harus dipahami oleh fasilitator agar perbedaan nilai iterasi tidak menyolok, melalui cara menampung kepentingan dan cara kluster geografis menilai sebuah persoalan itu (apa yang oleh Chantal Mouffe disebut sebagai “*aggregative politics*”). Pelbagai ragam keunikan

klaster geografis ini harus “ditumpahkan” di sebuah tempat yang terpusat, untuk diadu dan dinegosiasikan satu dengan yang lain; dan dari proses saling adu itu muncullah konsensus bersama yang menjadi cara pikir yang sesuai pada klaster geografis. Audit sosial adalah wadah di mana segala ragam klaster geografis yang saling bertentangan bisa dipertemukan melalui proses deliberasi rasional yang disebut dengan musyawarah.

Dalam konsepsi semacam ini, segala bentuk aspirasi yang ekstrem akan bisa ditumpulkan dan dimoderasikan melalui proses deliberatif-rasional di audit sosial. Konsensus pada akhirnya tak terhindarkan, karena alasan yang sederhana. Yakni, masing-masing klaster geografis yang diwakili oleh geografisnya itu bertindak atas dasar dorongan kepentingan pribadi atau identitasnya yang rasional (*self-interest*) yang mulai mengalami pelunakan. Kasus ini terjadi pada klaster geografis Jawa dengan angka iterasi yang kecil.

Audit sosial akan berhasil apabila terjadi hal berikut ini. Jika suatu klaster geografis mempunyai kepentingan dalam skala sepuluh, misalnya, dan skala itu dianggap terlalu ekstrem dalam konstelasi kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat bersangkutan, maka akan terdorong/dipaksa untuk melakukan kompromi dan menurunkan skala kepentingannya dari sepuluh menjadi, misalnya, enam atau lima, atau bahkan lebih rendah lagi (tergantung pada “*political constraint*” yang dihadapinya). Pemangku kepentingan itu kehilangan kesempatan sepenuhnya untuk meraih kepentingannya karena menolak kompromi, ia tentu saja lebih memilih kompromi, walau dengan resiko tak akan meraih kepentingannya secara penuh.

Dengan skema semacam ini, audit sosial yang bercirikan demokrasi liberal-pluralis membayangkan bahwa klaster geografis pada akhirnya akan bergerak pelan-pelan menuju kepada konsensus bersama. Semua pihak, dalam konsensus semacam itu, dipuaskan dan diuntungkan. Inilah skema “solusi menang-menang” yang dibayangkan dalam demokrasi liberal-pluralis. Audit sosial berada pada apa yang Noam Chomsky disebut sebagai “*manufacturing consent/consensus*”, rekayasa kesepakatan [10].

Pengaruh desain fakta dasar

Fakta dasar adalah fakta yang tidak dapat diuraikan lagi dan terpisah. Cara klaster geografis menyusun desain fakta dasar sangat mempengaruhi nilai iterasi pada klaster geografis. Kadang ada fakta dalam audit sosial itu bukan sebuah fakta final yang terpisah, tetapi sebuah fakta yang masih dapat diturunkan lagi. Dengan menggunakan pohon kesalahan (*fault tree*) maka masalah ini dapat ditanggulangi. Dengan adanya pohon kesalahan maka logika fakta dapat terumus dengan baik, tidak tumpah tindih.

Pohon kesalahan adalah bantuan berharga mencari fakta dasar dalam penilaian sebuah kebijakan dan pengembangan skema untuk perbaikan kebijakan. Analisis pohon kesalahan dimulai dengan 'puncak kejadian' yang biasanya peristiwa kesalahan kebijakan yang dikaitkan dengan fakta tertentu [11]. 'Pohon' tersebut yang kemudian dibangun oleh cabang-cabang

pengembangan dari atas ke bawah. Ini menyediakan cara untuk mengklasifikasikan fakta dasar. Sebuah dasar fakta dasar adalah batas kegagalan logika dapat diselesaikan. Perkembangan peristiwa adalah peristiwa yang bisa dipecah menjadi sub-komponen fakta, tetapi untuk tujuan dari model pengembangan, dan tidak dipecah lebih lanjut. Gerbang transfer digunakan untuk menghubungkan berbagai pohon kesalahan. Gerbang mentransfer kanan atau kiri asosiasi hasil dari pohon kesalahan dengan 'transfer' gerbang ke pohon kesalahan yang lain. Hasil konstruksi pohon kesalahan dengan menentukan kegagalan yang mengarah pada kegagalan kejadian utama. Idealnya, semua cabang logika dalam pohon kesalahan yang dikembangkan dari atas, lalu berhenti dalam dasar peristiwa.

Dalam audit sosial ada kalanya fakta dasar tumpang tindih. Tetapi metode untuk itu belum mampu diuraikan secara hierarkis. Dalam membangun audit sosial dengan fakta dasar maka alat bantu pohon kesalahan akan memberikan solusi.

Pemahaman terhadap Materi

Proses transfer pengetahuan antara pemangku kepentingan belum terjadi dengan baik. Padahal itu adalah kunci dalam audit sosial. Itu dapat dikatakan sebagai transfer pengetahuan dalam audit sosial memegang peranan penting dalam implementasi *Knowledge Management System (KMS)* dalam sebuah konsensus yang dibangun [12]. Salah satu faktor penentu sukses tidaknya suatu KMS tergantung pada adanya transfer pengetahuan dalam proses diskusi yang dipandu fasilitator. Bantuan teknologi informasi baik yang audio maupun visual akan mendukung untuk dilakukannya *sharing* dan *learning*. Transfer pengetahuan hanya bisa berjalan jika diintegrasikan dengan sistem diskusi yang ada dalam audit sosial. Kesadaran pemangku kepentingan untuk melakukan *sharing* tidak akan muncul jika tidak ada pendukung dari dalam fasilitasi audit sosial.

Transfer pengetahuan bisa diatur kedalam lima tahap. Tahap-tahap tersebut adalah: menstimulus ide dengan alat bantuan visual dan audio, *sharing* melalui diskusi, validasi melalui telaah lebih lanjut, dan mengecek apakah itu telah menyebar dan diadopsi. Fasilitator bisa mengecek dengan berbagai pertanyaan.

Relativisme klaster geografis dalam pembobotan

Dalam pembobotan di sebuah forum konsensus hal yang tidak dapat dihindari adalah masuknya nilai etik dari masing-masing klaster geografis dalam menilai kelompok yang lebih besar. Ini dapat dikatakan sebagai relativisme klaster geografis bahwa setiap individu berhak menentukan kaidah moralnya sendiri. Meskipun, kaidah moral kebanyakan individu tertentu pada praktiknya terlihat sama, karena kemungkinan mempunyai pengalaman kultural yang sama. Yaitu, yang berpendirian bahwa penilaian baik-buruk dan benar-salah tergantung pada masing-masing orang. Relativisme individual mengacu kepada apa yang berasal dari pikiran (kesadaran, ego, diri, persepsi-persepsi, putusan pribadi) dan bukan dari sumber-sumber objektif, hanya individual yang tahu. Relativisme klaster geografis berpendapat bahwa tidak ada fakta-fakta

“moral”. Meskipun putusan-putusan tersebut pada mulanya terlihat benar atau salah secara objektif, yaitu benar atau salah terlepas dari apa yang diyakini atau diinginkan banyak orang [13].

Menurut relativisme klaster geografis dalam masalah etis, emosi, dan perasaan berperan penting. Oleh karena itu, pengaruh emosi dan perasaan dalam keputusan moral harus diperhitungkan. Yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah tidak dapat dilepaskan dari orang yang bersangkutan dan menilainya. Ini sebenarnya terjadi juga pada audit sosial yang menggunakan konsensus dalam mengambil keputusannya. Relativisme individual melihat setiap individu manusia itu berbeda, maka berbeda pula dalam penilaian dan keputusan etisnya. Yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah bukanlah perkara yang berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat, bahkan bergantung pada orang yang menilainya.

IV. KESIMPULAN

1. Dalam konsensus sosial terjadi fenomena yang dinamakan dengan *outlier* –dalam hal ini nilai iterasi yang berbeda-yaitu fakta yang tidak sesuai dengan pembobotan. *Outlier* hadir karena proses berpikir para klaster geografis tidak selalu menggunakan teknik terstruktur, pada kesempatan tertentu kejadian yang mau dihadirkan dalam sebuah fakta tidak secara sempurna dilukiskan oleh bahasa simbolnya. Namun forum konsensus mengafirmasi fakta itu karena dilanjutkan penjelasan oleh pemberi gagasan. Pada pencatatan fakta terjadi ketidaksinkronan antara fakta dengan pembobotannya.
2. Fakta seperti itu berada di atas *upper limit* atau di bawah *lower limit* dari pembobotan. Maksudnya di atas *upper limit*, bahwa fakta *overvalued*, sedangkan kalau di bawah *lower limit* maka fakta berada pada *undervalued*. Artinya terjadi kejadian fakta yang berada pada diluar *region border* dari pembobotan. Selalu ada dua atau tiga *outlier* yang hadir dalam sebuah regresi nilai dalam pembobotan. Namun pada keseluruhan fakta *outlier* bukanlah faktor yang dominan. Banyak fakta dominan lainnya yang memperkuat bobot yang muncul. Artinya apabila diambil plot pada data tersebut maka sebagian data masih berada di sekitar nilai bobot sebenarnya.
3. Fenomena *outlier* ini menandakan bahwa nilai bahasa setiap klaster geografis yang melakukan audit sosial tidak sama. Nilai bahasanya sangat bergantung dari pola dan tata nilai masyarakat tersebut. Masyarakat dengan gaya pengungkapan *straight forward* sering kali mengalami kejadian pembobotan *undervalued*, sedangkan masyarakat dengan gaya pengungkapan *not straight forward* (*symbolicum*) sering kali mengalami peristiwa pembobotan *overvalued*.
4. Nilai pembobotan yang tidak sebanding dengan fakta atau mengalami pergeseran sehingga berada di luar nilai sebenarnya adalah fenomena yang harus menjadi perhatian dalam audit sosial. Audit sosial sebagai alat ukur oleh pemangku kepentingan mempunyai akurasi yang terbatas. Kepresisian pada tingkat tertentu sebenarnya sudah bisa menjelaskan apa yang terjadi pada program tersebut.

Artinya tingkat kepresisian yang baik tidak terlalu dibutuhkan dalam audit sosial, yang dibutuhkan dalam audit sosial adalah pemangku kepentingan melakukan judgement terhadap keadaan, sehingga mereka punya pengalaman yang berkesan dan signifikan terhadap kegiatan itu dan akan menjadi umpan balik berikutnya dalam program yang sama. Proses audit sosial sebagai pengalaman *judgement* adalah momen kritis dari audit sosial sendiri dalam melakukan evaluasi, umpan balik, dan perbaikan pada rantai masing-masing dimana pemangku kepentingan ada di situ.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Janet V. Denhardt dan Robert B. Denhardt, *The New Public service: Serving, not Steering*, New York: ANSI, 2002. Khusus untuk gagasan-gagasan *The Old Public Administration* dapat dilihat dalam Jay M. Shafritz dan Albert C.Hyde, *Classics of Public Administration, USA: Harcourt Brace & company*, 1978.
- [2] Director General & Executive Director, Centre for Good Governance, *Social Audit: A Toolkit A Guide for Performance Improvement and Outcome Measurement* (Centre for Good Governance Hyderabad, 2005) hal.9.
- [3] Peter Verhezen, *Consensus on Global Governance Principles* (Melbourne: Department of Management & Marketing, University of Melbourne, Victoria, Australia, 2009) hal.89.
- [4] Peterson Institute for International Economics, *Some Basic Facts about the Service Sector and Service Trade*, hal.12.
- [5] Savenye C., Wilhelmina, *Qualitative Research Issues and Methods*, (Arizona: Arizona State University,) hal.1051.
- [6] Smith, M., & Glass, G., *Research and evaluation in education and the social sciences*, (Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987).
- [7] Stamatelators, Michael, *Fault Tree Handbook with Aerospace Applications* (Washington, NASA Office of Safety and Mission Assurance, 2002), hal.1.
- [8] Lin, Julian, *The Effects of Goal Orientations on Knowledge, Sourcing, Knowledge Management System Usage, and Learning Outcome*, (Singapore: Dept of Information Systems, NUs, 2006) hal. 2-4.
- [9] Baccini Leonardo, *The Return of Hegemonic Theory Dominant States and the Origins of International Cooperation* (Princeton: Princenton University, 2011). Hal 2.
- [10] Galston A., William, *The Practice of Liberal Pluralism* (Cambridge: University of Maryland, Cambridge University Press, 2005) hal 1-2.
- [11] Stamatelators, Michael, *Fault Tree Handbook with Aerospace Applications* (Washington, NASA Office of Safety and Mission Assurance, 2002),hal.1.
- [12] Lin, Julian, *The Effects of Goal Orientations on Knowledge, Sourcing, Knowledge Management System Usage, and Learning Outcome*, (Singapore: Department of Information Systems, NUs, 2006)
- [13] Sheehy, Paul, *Moral Relativism*, (*Richmonb Journal of Philosophy*, 2006).